

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TIM UJI KESESUAIAN JABATAN (JOB FIT) SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223 Fax. 021 3157759

PENGUMUMAN UJI KESESUAIAN JABATAN (JOB FIT) SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

NOMOR: 01/UKJ/SetjenKPU/XI/2021

Dalam rangka pengisian Jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada 23 Provinsi, dengan ini Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengundang para Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti Uji Kesesuaian Jabatan (Job Fit) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. JABATAN YANG DIBUKA

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 23 Provinsi yaitu sebagai berikut:

NO	JABATAN YANG DIBUKA		
1	PROVINSI SUMATERA UTARA		
	1	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	
	2	KABUPATEN ASAHAN	
	3	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	
	4	KABUPATEN NIAS BARAT	
	5	KOTA SIBOLGA	
	6	KOTA MEDAN	
2	PROVINSI SUMATERA BARAT		
	1	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	
	2	KABUPATEN PASAMAN BARAT	
	3	KABUPATEN AGAM	
3	PROVINSI RIAU		
	1	KABUPATEN BENGKALIS	
4	PROVINSI SUMATERA SELATAN		
	1	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	
5	PROVINSI BENGKULU		
	1	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	
	2	KABUPATEN LEBONG	

NO	JABATAN YANG DIBUKA		
6	PROVINSI KEPULAUAN RIAU		
	1	KABUPATEN KARIMUN	
	2	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	
7	PROVINSI JAWA BARAT		
	1	KABUPATEN TASIKMALAYA	
	2	KABUPATEN SUMEDANG	
	3	KABUPATEN INDRAMAYU	
	4	KABUPATEN BEKASI	
	5	KOTA CIREBON	
	6	KOTA TASIKMALAYA	
8	PROVINSI JAWA TENGAH		
	1	KABUPATEN GROBOGAN	
	2	KABUPATEN REMBANG	
	3	KABUPATEN PEMALANG	
	4	KOTA SEMARANG	
	5	KABUPATEN WONOSOBO	
9	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		
	1	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	
10	PROVINSI JAWA TIMUR		
	1	KABUPATEN BLITAR	
	2	KABUPATEN NGAWI	
	3	KABUPATEN LAMONGAN	
	4	KABUPATEN SUMENEP	
	5	KOTA BLITAR	
	6	KOTA SURABAYA	
11	PRO	VINSI BANTEN	
	1	KABUPATEN SERANG	
12	PROVINSI BALI		
	1	KABUPATEN KLUNGKUNG	
13	PRO	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	
	1 KOTA MATARAM		
14	PRO	VINSI KALIMANTAN BARAT	
	1	KABUPATEN BENGKAYANG	
	2	KABUPATEN SEKADAU	

NO	JABATAN YANG DIBUKA		
15	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
	1	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	
	2	KABUPATEN KAPUAS	
	3	KOTA PALANGKARAYA	
16	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		
	1	KABUPATEN TAPIN	
	2	KABUPATEN BALANGAN	
	3	KOTA BANJARMASIN	
17	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		
	1	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	
	2	KABUPATEN BERAU	
	3	KABUPATEN KUTAI TIMUR	
	4	KABUPATEN MAHAKAM ULU	
18	PROVINSI SULAWESI UTARA		
	1	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	
19	PRO	VINSI SULAWESI TENGAH	
	1	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	
20	PRO	PROVINSI SULAWESI SELATAN	
	1	KABUPATEN BANTAENG	
21	PROVINSI GORONTALO		
	1	KABUPATEN POHUWATO	
22	PROVINSI MALUKU UTARA		
	1	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	
	2	KOTA TIDORE KEPULAUAN	
23	PRO	VINSI PAPUA	
	1	KABUPATEN MIMIKA	
	2	KABUPATEN KEEROM	
	3	KABUPATEN YAHUKIMO	
	4	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	
	5	KABUPATEN MAPPI	
	6	KOTA JAYAPURA	

B. PERSYARATAN PELAMAR

- 1. Persyaratan Umum
 - a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - 1) PNS Organik Sekretariat Jenderal KPU;
 - 2) PNS Yang Dipekerjakan (DPK) pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan ketentuan:
 - Telah Lulus Ujian Alih Status menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - b) Telah mendapatkan Persetujuan Alih Status menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal.
 - 3) PNS Instansi Lain yang sedang proses alih status menjadi PNS Organik KPU dengan ketentuan:
 - a) Telah mendapatkan Persetujuan Sekretaris Jenderal KPU untuk mutasi/alih status menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU; dan
 - b) Telah mendapatkan Persetujuan Alih Status menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal.
 - b. Memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang Penata Tingkat I (III/d).
 - c. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pengawas (Eselon IV) paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional Ahli Muda yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas yang akan diduduki.
 - d. Pendidikan minimal Diploma IV (D IV)/Sarjana (S1).
 - e. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - f. Tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang dalam proses peradilan pidana.
 - g. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio kultural sesuai standar kompetensi.
 - h. Sehat jasmani dan rohani.
 - i. Berintegritas, yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas.
 - j. Mendapatkan Persetujuan untuk mengikuti Uji Kesesuaian Jabatan (Job Fit) bagi:
 - 1) PNS Organik Sekretariat Jenderal KPU dan PNS Yang Dipekerjakan (DPK) pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Telah Lulus Ujian Alih Status menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh Atasan setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
 - 2) PNS Instansi Lain yang sedang proses alih status menjadi PNS Organik KPU, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal KPU.
 - k. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada tanggal 29 November 2021.
 - 1. Telah melaporkan LHKPN/LHKASN Tahun 2020.
 - m. Telah menyerahkan SPT Pajak Tahunan Tahun 2020/Tanda Bukti Lapor.

2. Persyaratan Khusus

- a. Tidak pernah mendapat sanksi pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu berupa peringatan keras/keras terakhir atau pemberhentian sementara/tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- b. Tidak memiliki hubungan keluarga (suami/istri, orang tua/anak) dengan Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Pejabat Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Satuan Kerja yang sama.
- c. Peserta hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

C. KETENTUAN PENDAFTARAN

- Pengumuman pendaftaran dari tanggal 30 November 2021 s.d.
 Desember 2021 melalui laman Komisi Pemilihan Umum di www.kpu.go.id.
- 2. Keseluruhan berkas persyaratan administrasi dikirimkan melalui alamat email sesuai jabatan yang dilamar (sesuai wilayah Provinsi), sebagai berikut:

No	Jabatan Yang Dilamar (sesuai wilayah Provinsi)	Alamat Email
1	Provinsi Sumatera Utara	ukj.set_sumut@kpu.go.id
2	Provinsi Sumatera Barat	ukj.set_sumbar@kpu.go.id
3	Provinsi Riau	ukj.set_riau@kpu.go.id
4	Provinsi Sumatera Selatan	ukj.set_sumsel@kpu.go.id
5	Provinsi Bengkulu	ukj.set_bengkulu@kpu.go.id
6	Provinsi Kepulauan Riau	ukj.set_kepri@kpu.go.id
7	Provinsi Jawa Barat	ukj.set_jabar@kpu.go.id
8	Provinsi Jawa Tengah	ukj.set_jateng@kpu.go.id
9	Provinsi DI Yogyakarta	ukj.set_diy@kpu.go.id
10	Provinsi Jawa Timur	ukj.set_jatim@kpu.go.id
11	Provinsi Banten	ukj.set_banten@kpu.go.id
12	Provinsi Bali	ukj.set_bali@kpu.go.id
13	Provinsi Nusa Tenggara Barat	ukj.set_ntb@kpu.go.id
14	Provinsi Kalimantan Barat	ukj.set_kalbar@kpu.go.id
15	Provinsi Kalimantan Tengah	ukj.set_kalteng@kpu.go.id
16	Provinsi Kalimantan Selatan	ukj.set_kalsel@kpu.go.id
17	Provinsi Kalimantan Timur	ukj.set_kaltim@kpu.go.id
18	Provinsi Sulawesi Utara	ukj.set_sulut@kpu.go.id
19	Provinsi Sulawesi Tengah	ukj.set_sulteng@kpu.go.id
20	Provinsi Sulawesi Selatan	ukj.set_sulsel@kpu.go.id
21	Provinsi Gorontalo	ukj.set_gorontalo@kpu.go.id
22	Provinsi Maluku Utara	ukj.set_malut@kpu.go.id
23	Provinsi Papua	ukj.set_papua@kpu.go.id

- 3. Persyaratan sebagaimana angka 2 (dua) dikirim dalam *format (.pdf)*, dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Pas foto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4 x 6;
 - d. Ijazah yang dipersyaratkan;
 - e. SK pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - f. SK pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - g. Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan/atau Diklat Kepemimpinan Tingkat III (apabila sudah mengikuti dan lulus Diklat);
 - h. Sertifikat diklat teknis dan/atau diklat fungsional (apabila sudah mengikuti dan lulus Diklat);
 - i. SKP dalam 2 tahun terakhir dengan nilai BAIK;
 - j. Persetujuan untuk mengikuti Uji Kesesuaian Jabatan (Job Fit):
 - 1) Bagi PNS Organik Sekretariat Jenderal KPU dan PNS Yang Dipekerjakan (DPK) pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Telah Lulus Ujian Alih Status menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh Atasan setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), di atas materai Rp.10.000,- (terlampir);
 - 2) Bagi PNS Instansi Lain yang sedang proses alih status menjadi PNS Organik KPU, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal KPU, di atas materai Rp.10.000,- (terlampir);
 - k. Tanda bukti lapor LHKPN/LHKASN Tahun 2020;
 - 1. Tanda bukti lapor SPT Pajak Tahunan Tahun 2020;
 - m. Surat Pakta Integritas, ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (terlampir);
 - n. Daftar Riwayat hidup (DRH) lengkap, ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (terlampir);
 - o. Surat Lamaran, ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- dengan mencantumkan jabatan yang akan dilamar (terlampir);
 - p. Surat pernyataan tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang dalam proses peradilan pidana:
 - 1) Bagi PNS Organik Sekretariat Jenderal KPU dan PNS Yang Dipekerjakan (DPK) pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Telah Lulus Ujian Alih Status menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh Atasan setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) (terlampir);
 - 2) Bagi PNS Instansi Lain yang sedang proses alih status menjadi PNS Organik KPU, melampirkan Surat Pernyataan Tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang dalam proses peradilan pidana yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Instansi Asal pada saat proses alih status menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU.
 - q. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit/fasilitas kesehatan pemerintah;
 - r. Bagi PNS Yang Dipekerjakan (DPK) pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Telah Lulus Ujian Alih Status menjadi PNS

Sekretariat Jenderal KPU pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, melampirkan:

- 1) Pengumuman lulus ujian alih status menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU;
- 2) Surat Persetujuan Alih Status menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal.
- s. Bagi PNS Instansi Lain yang sedang proses alih status menjadi PNS Organik KPU, melampirkan:
 - 1) Surat Persetujuan Sekretaris Jenderal KPU untuk mutasi/alih status menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU;
 - 2) Surat Persetujuan Alih Status menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal.
- t. Surat pernyataan tidak pernah mendapat sanksi pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu berupa peringatan keras/keras terakhir atau pemberhentian sementara/tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (terlampir);
- u. Surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga (suami/istri, orang tua/anak) dengan Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Pejabat Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Satuan Kerja yang sama, ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (terlampir).

D. TAHAPAN PELAKSANAAN UJI KESESUAIAN JABATAN (JOB FIT)

No.	Kegiatan	** Hari/Tanggal
1.	Pengumuman, Pendaftaran dan Penerimaan berkas lamaran	30 November 2021 s.d. 6 Desember 2021
2.	*Seleksi administrasi	30 November 2021 s.d. 13 Desember 2021
3.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	14 Desember 2021
4.	Wawancara	17 s.d. 23 Desember 2021
5.	Pengumuman 3 (tiga) besar	28 Desember 2021
6.	Pengajuan nama calon kepada Pejabat Pembina Kepegawaian	29 Desember 2021

Catatan:

- * Apabila pada seleksi administrasi jumlah calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang lolos seleksi administrasi kurang dari 3 (tiga) orang, maka Tahapan Uji Kesesuaian Jabatan (Job Fit) tidak dilanjutkan. Bahwa sesuai ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 366/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1257/SDM.05.5/04/2021 pengisian Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dilakukan melalui mekanisme Mutasi atau Promosi.
- ** Hari dan tanggal tahapan dapat berubah sewaktu waktu, dan setiap perubahan akan disampaikan melalui laman KPU <u>www.kpu.go.id</u>.

E. PENGUMUMAN HASIL UJI KESESUAIAN JABATAN (JOB FIT)

- 1. Pengumuman hasil tiap tahapan Uji Kesesuaian Jabatan (*Job Fit*) dan informasi lebih lanjut mengenai tahapan Uji Kesesuaian Jabatan (*Job Fit*) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021 dapat dilihat melalui laman KPU www.kpu.go.id.
- 2. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Dalam Uji Kesesuaian Jabatan (Job Fit) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021, tidak dipungut biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.
- 2. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan tidak benar, maka Tim Uji Kesesuaian Jabatan berhak membatalkan hasil Uji Kesesuaian Jabatan (Job Fit).
- 3. Keputusan Tim Uji Kesesuaian Jabatan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 30 November 2021 TIM UJI KESESUAIAN JABATAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021 KETUA SEKRETARIAT,

ttd

(Yuli Hertaty)